PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya)

Oleh :
Dini Tri Handayani – 21113131
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
Email : Dini.dth@gmail.com

ABSTRACT

Tax is a potential state income to support the success of national development. Tax revenues as of June 2016 were lower by Rp 17.7 trillion compared to the same period last year. Compliance of the taxpayer in Indonesia is still concerned about 20 million taxpayers who submit his Periodic Tax Return is only 12.56 million only. Implementation of tax collection is still not optimal, because there are still taxpayers who do not want to pay the tax debt even though it has been given reprimand letter. This study aims to determine the effect of Self Assessment System which is represented by the amount of periodic tax return and tax collection as represented by the amount of reprimand letter againts the value added tax receipts either partially. The research data is secondary data, which is the amount of monthly payment slip of Periodic Tax Return, reprimand letter, and value added tax receipts for 60 months.

Research method used is descriptive method and verifikatif with quantitative approach. Data analysis techniques in this study using multiple linear regression analysis. This model is done using SPSS software and aims to prove the relationship of independent variable to dependent variable.

The results showed that the Self Assessment System gives influence to Value Added Tax (VAT)with a positive moderate relationship. reprimand letters also give effect to the acceptance of Value Added Tax with a moderate relationship.

Keywords : Self Assessment System, Periodic Tax Return, Tax Collection, Reprimand Letter, Value Added Tax (VAT).

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan dana untuk pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah (Fathmah, 2009).

Penerimaan PPN selama ini menjadi penyumbang terbesar kedua dalam struktur penerimaan pajak setelah Pajak Penghasilan (Irawan, 2014). Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan, bahkan disalahgunakan (Tarjo dan Indra, 2006). Ini terbukti dalam kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak (Mahendra, 2014).

Seperti hal nya yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya. Dari data tabel 1.1 menunjukkan bahwa penyampaian SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak pada bulan Februari, April dan September tahun 2016 mengalami kenaikan, akan tetapi penyampaian SPT Masa PPN tersebut belum diimbangi dengan peningkatan penerimaan PPN (Yanuar, 2017). Hal tersebut berbanding terbalik dengan teori yang dikemukakan, bahwa semakin banyaknya Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak yang menerapkan *Self Assesment System* dengan baik melalui penyampaian SPT Masa PPN yang dilaporkan seharusnya dapat meningkatkan penerimaan PPN.

Kepatuhan dari Wajib Pajak di Indonesia masih memprihatinkan. Jumlah rasio kepatuhan yaitu yang membayar dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dibandingkan dengan Wajib Pajak yang terdaftar hanya 56 persen pada tahun 2013 dan sedikit mengalami peningkatan pada 2016 yakni 62,2 persen. 20 juta Wajib Pajak yang menyerahkan SPT-nya hanya 12,56 juta saja. Jadi ini tingkat kepatuhan yang tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia maupun Dunia. (Sri Mulyani, 2016)

Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak, dan apabila utang pajak berdasarkan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, akan dilakukan tindakan penagihan pajak, salah satunya berupa surat teguran (Hazra, 2015).

Dari konsep dan teori yang telah dipaparkan diatas, muncul kesenjangan antara konsep dengan kenyataan yang terjadi, bahwa pada tahun 2016 penerimaan PPN tidak bertambah secara signifikan setiap bulannya,

Pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran masih belum optimal, karena masih ada Wajib Pajak yang tidak mau membayar utang pajaknya meskipun telah diberikan Surat Teguran sehingga setiap bulannya KPP Pratama Majalaya mengeluarkan surat teguran yang diterbitkan oleh bagian penagihan pajak yang pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan November mengalami peningkatan namun peningkatan jumlah surat teguran yang beredar belum diimbangi dengan penerimaan PPN yang meningkat (Ayi Sidik, 2017). Hal tersebut berbanding terbalik dengan teori yang dikemukakan, bahwa semakin banyak Surat Teguran yang dikeluarkan maka seharusnya diimbangi dengan peningkatan penerimaan PPN.

Berkaitan dengan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: "**Pengaruh *Self Assessment System* dan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)".**

1.2 Rumusan Masalah

1) Seberapa besar pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan PPN.
2) Seberapa besar pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran terhadap Penerimaan PPN.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaiman pengaruh *self assessment system* dan penagihan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan PPN.
2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran terhadap Penerimaan PPN.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

1) Meningkatkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai pengaruh self assessment system dan penagihan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
2) Sebagai bahan evaluasi atau pebandingan antara teori yang didapat diperkuliahan dengan penelitian dilapangan.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1) Bagi penulis
   Dapat menambah wawasan dan mengkaji kembali bagi penulis terutama dalam bidang akuntansi perpajakan.
2) Bagi peneliti lainnya
   Memberikan masukkan informasi pada pembaca yang akan melakukan penelitian yang serupa.
3) Bagi perusahaan
   Kegunaan penelitian ini bagi perusahaan adalah dapat dijadikan sebagai bahan masukkan dan pertimbangan dalam upaya mendorong kepatuhan wajib pajak.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Self Assessment System*

2.1.1.1 Pengertian *Self Assessment System*

Menurut (Halim, 2014:7) menyatakan bahwa :

"*Self Assessment System* adalah suatu jenis sistem pemungutan pajak yang melimpahkan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri besarnya pajak yang seharusnya dibayar".

2.1.1.2 Indikator *Self Assessment System*

Indikator *Self Assessment System* adalah Jumlah Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:171) Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN adalah sebagai berikut:

"Merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara wajib Pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai".

2.1.2 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

2.1.2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Definisi penagihan pajak menurut Mardiasmo (2013:125), yaitu :

"Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita".

2.1.2.2 Pengertian Surat Teguran

Menurut Priantara (2013:115) Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

2.1.2.3 Indikator Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Penagihan pajak guna untuk mencairkan tunggakan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan surat teguran, dan surat teguran diterbitkan apabila penanggung pajak tidak

melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran (Meilia, 2015:5). Berdasarkan pengertian tersebut indikator pada variabel Penagihan Pajak dengan Surat Teguran adalah Jumlah Surat Teguran.

2.1.3 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Pengertian Penerimaan Pajak menurut Simajuntak Timbul dan Mukhlis Imam (2012:30) yaitu, Penerimaan Negara dari pajak merupakan satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan.

2.1.3.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Definisi Pajak Pertamabahan Nilai menurut Waluyo (2011:46) menyatakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut :

> "Pajak yang dikenakan atas komsumsi di dalam negeri (di Daerah Pabean) baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa".

2.1.3.3 Indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Dari dasar pemikiran di atas maka indikator penerimaan pajak dalam hal ini Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah hasil-hasil penerimaan atau jumlah realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Nuramalia Hasanah, dkk, 2012) bahwa *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dijelaskan sebagai berikut :

> "Perubahan sistem pemungutan pajak dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan dari penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak."

2.2.2 Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2013:68) mendefinisikan hubungan antara Penagihan Pajak dengan Penerimaan PPN sebagai berikut:

> "Penagihan pajak berhubungan terhadap penerimaan pajak yaitu perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang sangat besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini belum diimbangi dan kegiatan pencairannya, namun dengan demikian secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat terhadap tunggakan pajak maka perlu dilaksanakan penagihan".

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif.

3.2 Operasionalisasi Variabel

1) Variabel Bebas/Independent Variable (X1 dan X2)

Menurut Sugiyono (2012:39), menyatakan bahwa variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent (terikat). Adapun variabel bebas (independent variable) dalam penelitian ini adalah *Self Assessment System* (Variabel X1), dan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran (Variabel X2).

2) Variabel Tidak Bebas/Dependent Variabel (Y)

Menurut Sugiyono (2012:39), menyatakan bahwa variabel tidak bebas adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Adapun variabel tidak bebas (dependent variable) dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak pertambahan nilai (variabel Y).

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015:236) teknik pengumpulan data merupakan serangkaian cara-cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data agar diperoleh data yang valid, reliable, dan obyektif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*Library Research*).

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat serta Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Populasi sasaran yang diambil dalam penelitian ini adalah data laporan SPT Masa PPN, Surat Teguran, dan Penerimaan PPN periode januari sampai dengan desember tahun 2012-2016, karena jika pertahun data tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilakukan perhitungan statistik pada uji asumsi klasik.

3.4.2 Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah data laporan SPT Masa PPN, Surat Teguran, dan Penerimaan PPN tahun 2012 - 2016 yang diambil dari setiap bulannya sebanyak 60 bulan di KPP Pratama Majalaya.

3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, maka penulis mengadakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya yang berlokasi di Jalan Peta No. 7 Bandung 40232 Telp. (022) 6078535. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada Januari sampai dengan September 2017.

3.5 Metode Pengujian Data

Pengujian hipotesis yang menggunakan model regresi berganda harus dapat memenuhi uji asumsi klasik.

1) Uji Normalitas

Menurut Husein Umar (2011:182) menyatakan bahwa uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak.

2) Uji Multikolinieritas

Menurut Husein Umar (2011:177) menyatakan bahwa uji multikolinieritas adalah untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinieritas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Husein Umar (2011:179) menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain.

4) Uji Autokorelasi

Menurut Husein Umar (2011:182) menyatakan bahwa uji autokorelasi adalah untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian.

3.6 Metode Analisis Data

1. Persamaan Regresi

$$Y = \alpha + b1X1 + b2X2 + \varepsilon$$

2. Analisis Koefisien Korelasi

Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat Rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2012: 184)

3. Analisis Koefisien Determinasi

Analisis Koefisien Deteriminasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) memiliki dampak terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase.

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Sumber: Umi Narimawati (2010:50)

Keterangan:
Kd = Koefisien Determinasi
r^2 = Koefisien Korelasi

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

4.1.1.1 Analisis Deskriptif *Self Assessment System*

Pada gambar grafik terlihat bahwa *Self Assessment System* yang diukur melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya periode tahun 2012-2016 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Penurunan rata-rata jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN hanya terjadi di tahun 2013 dan 2015.

4.1.1.2 Analisis Deskriptif Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Pada gambar grafik terlihat bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya pada tahun 2012-2016 mengalami fluktuasi. Secara keseluruhan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya mengalami kenaikan dan penurunan tiap bulannya.

4.1.1.3 Analisis Deskriptif Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan gambar 4.3 dapat dilihat gambaran perkembangan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya dari tahun 2012 hingga tahun 2016 yang mengalami fluktuasi.

4.1.2 Hasil Analisis Verifikatif

4.1.2.1 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Pada tabel *output* SPSS, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas yang di lihat dari nilai Asymp Sig. adalah sebesar 0,427 dan nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka sesuai dengan kriteria pengujian dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi secara normal, sehingga model telah memenuhi salah satu syarat untuk dilakukan pengujian regresi. Adapun secara visual gambar grafik normal probability plot dapat dilihat pada Gambar 4.4.

Grafik tersebut mempertegas bahwa model regresi yang diperoleh berdisitribusi normal, dimana sebaran data berada di sekitar garis diagonal.

2. Uji Multikolinieritas

Berdasarkan nilai VIF yang diperoleh seperti terlihat pada tabel 4.5 di atas menunjukkan tidak ada korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel bebas.

3. Uji Heteteroskedastisitas

Pada Gambar 4.5 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas pada model regresi, karena tidak ada pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, sehingga model regresi layak untuk digunakan.

4. Uji Autokorelasi

Berdasarkan tabel di atas hasil pengolahan diperoleh nilai statistik Durbin-Watson (D-W) sebesar 1,959. Sementara dari Tabel D-W dengan tingkat signifikan (a = 5%), untuk jumlah variabel bebas sebanyak 2 variabel (k = 2), dan jumlah pengamatan pada penelitian sebanyak 60 sampel (n = 60), maka diperoleh nilai batas bawah (dL) sebesar 1,514 dan batas atas (dU) sebesar 1,651. Karena nilai Durbin-Watson model regresi pada hasil pengolahan sebesar 1,959 dan lebih besar dari batas atas (dU) 1,651 serta kurang dari 4 – 1,651 (4 – dU), maka disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat autokorelasi. Karena keempat asumsi regresi sudah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa hasil estimasi model regresi sudah memenuhi syarat BLUE *(Best Linear Unbias Estimation)* sehingga dikatakan kesimpulan yang diperoleh dari model regresi sudah menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

4.1.2.2 Persamaan Regresi Linier Berganda

Dari tabel *output* di atas diperoleh nilai a sebesar -5,279E9 β_1 sebesar 1,553E7 dan β_2 sebesar 2,375E8 Dengan demikian, persamaan regresi linier berganda yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

$$Y= -5{,}279E9 + 1{,}553E7\ (X_1) + 2{,}375E8\ (X_2)$$

4.1.3 Analisis Korelasi

4.1.3.1 Analisis Korelasi Pearson

1) Analisis Korelasi *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan tabel, hubungan antara *Self Assessment System* dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ketika Penagihan Pajak dengan Surat Teguran tidak berubah adalah sebesar 0,469, artinya *Self Assessment System* memilki hubungan sedang dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini terlihat dari nilai korelasi berada diantara

0,40 hingga 0,599 yang tergolong dalam kategori sedang. Hubungan yang bersifat positif artinya, setiap kenaikan *Self Assessment System* maka hal tersebut akan meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan begitupun sebaliknya.

2) Analisis Korelasi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan table, hubungan antara Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ketika *Self Assessment System* tidak berubah adalah sebesar 0,456, artinya Penagihan Pajak dengan Surat Teguran memilki hubungan sedang dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini terlihat dari nilai korelasi berada diantara 0,40 hingga 0,599 yang tergolong dalam kategori sedang. Hubungan yang bersifat positif artinya, setiap kenaikan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran maka hal tersebut akan meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan begitupun sebaliknya.

4.1.4 Analisis Koefisien Determinasi

1) Koefisien Determinasi *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan tabel 4.8 maka diperoleh nilai koefisien determinasi parsial dari variabel *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai berikut:

$Kd = (0,469)^2 \times 100\%$

$= 21,99\%,$

Berdasarkan perhitungan di atas, terlihat bahwa pengaruh variabel *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu sebesar 21,99%, sedangkan sisanya sebesar 78,01% merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

2) Koefisien Determinasi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan table 4.9 maka diperoleh nilai koefisien determinasi parsial dari variabel Penagihan Pajak dengan Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai berikut:

$Kd = (0,456)^2 \times 100\%$

$= 20,79\%,$

Berdasarkan perhitungan di atas, terlihat bahwa pengaruh variabel Penagihan Pajak dengan Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu sebesar 20,79%, sedangkan sisanya sebesar 79,21% merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.1.5 Pengujian Hipotesis

4.1.5.1 Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

1. Pengujian Hipotesis Parsial *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dengan menggunakan SPSS, diperoleh hasil uji hipotesis parsial X_1, dari *output SPSS* diperoleh nilai t_{hitung} untuk *Self Assessment System* (X_1) sebesar 4,106. Dengan tingkat signifikan (α) sebesar 5%, dan derajat kebebasan (df) = 57, maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,002. Sehingga dapat disimpulkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (4,106 > 2,002) dan dapat disimpulkan bahwa H_o ditolak dan H_1 diterima. Hasil ini juga ditunjukkan oleh nilai signifikansi uji statistik untuk variabel *Self Assessment System* sebesar 0,000, artinya kesalahan untuk mengatakan ada pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0% atau berarti lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat di terima sebesar 5% sehingga dapat diputuskan untuk menolak H_o. Kesimpulannya, *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya. Untuk mempermudah dalam memahami hasil uji hipotesis, maka digambarkan daerah penolakan dan penerimaan H_o.

2. Pengujian Hipotesis Parsial Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dengan menggunakan SPSS, diperoleh hasil uji hipotesis parsial X_2, dari *output SPSS* diatas diperoleh nilai t_{hitung} untuk Penagihan Pajak dengan Surat Teguran (X_2) sebesar 3,782. Dengan tingkat signifikan (α) sebesar 5%, dan derajat kebebasan (df) = 57, maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,002. Sehingga dapat disimpulkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,782 > 2,002) dan dapat disimpulkan bahwa H_o ditolak dan H_1 diterima. Hasil ini juga ditunjukkan oleh nilai signifikansi uji statistik untuk variabel *Self Assessment System* sebesar 0,000, artinya kesalahan untuk mengatakan ada pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0% atau berarti lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat di terima sebesar 5% sehingga dapat diputuskan untuk menolak H_o. Kesimpulannya, Penagihan Pajak dengan Surat Teguran berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya. Untuk mempermudah dalam memahami hasil uji hipotesis, maka digambarkan daerah penolakan dan penerimaan H_o

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Self Assessment System yang diukur melalui pada KPP Pratama Majalaya secara keseluruhan mengalami fluktuasi setiap bulannya. Meningkatnya Jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN disebabkan oleh meningkatnya kesadaran Pengusaha Kena Pajak dalam melaporkan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dipungut dari pelanggan. Sedangkan menurunnya jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN disebabkan oleh banyaknya Pengusaha Kena Pajak yang tidak melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dipungut dari pelanggan. Adapun dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan nilai korelasi antara *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu tergolong dalam kategori sedang. Hubungan yang bersifat positif artinya setiap kenaikan *Self Assessment System* maka akan meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perubahan sistem pemungutan pajak dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan dari penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak (Nuramalia Hasanah, dkk, 2012).

Kemudian besar presentase pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu sebesar 21,99%. Dilihat dari hasil tersebut, maka pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kurang dominan. Artinya terdapat faktor lain sebesar 78,01%% yang dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kondisi tersebut membuktikan dan menjawab fenomena yang telah dikemukakan sebelumnya yang terjadi di KPP Pratama Majalaya pada bulan Februari, April dan September tahun 2016 dimana *Self Assessment System* yang diukur melalui SPT Masa PPN mengalami kenaikan, akan tetapi penyampaian SPT Masa PPN tersebut belum diimbangi dengan peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan hasil ini menunjukan bahwa faktor lain lebih dominan mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibandingkan dengan *Self Assessment System.*

4.2.2 Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada KPP Pratama Majalaya mengalami fluktuasi setiap bulannya. Tingginya jumlah penerbitan surat teguran disebabkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang masih memiliki hutang pajak dan belum melunasinya yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, serta tidak dibayarnya pajak oleh Penanggung Pajak yang sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dilaksanakan penagihan pajak. Sedangkan menurunnya jumlah penerbitan surat teguran karena Pengusaha Kena Pajak sudah melunasi hutang pajaknya sebelum jatuh tempo sehingga tidak ada surat

tagihan pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya. Adapun dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan nilai korelasi antara Penagihan Pajak dengan Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu tergolong dalam kategori sedang. Hubungan yang bersifat positif artinya setiap kenaikan jumlah Penagihan Pajak dengan Surat Teguran maka akan meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penagihan pajak mempunyai fungsi dalam mengamankan penerimaan negara. Apabila banyak utang pajak yang tidak tertagih maka akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, tindakan penagihan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk menjaga penerimaan Negara (Ida Zuraida, L.Y Hari Sih Advianto. 2011:139).

Kemudian besar presentase pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu sebesar 20,79%. Dilihat dari hasil tersebut, maka pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kurang dominan. Artinya terdapat faktor lain sebesar 79,21% yang dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kondisi tersebut membuktikan dan menjawab fenomena yang telah dikemukakan sebelumnya yang terjadi di KPP Pratama Majalaya pada pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan November tahun 2016 yang menunjukan bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Teguran mengalami peningkatan namun peningkatan jumlah surat teguran yang beredar belum diimbangi dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang meningkat. Dengan hasil ini menunjukan bahwa faktor lain lebih dominan mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibandingkan dengan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dimana jika *Self Assessment System* yang diukur melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN meningkat maka Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga akan meningkat begitu pun jika sebaliknya.
2. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dimana jika jumlah Penagihan Pajak dengan Surat Teguran meningkat maka Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga akan meningkat begitu pun jika sebaliknya.

5.2 Saran

a. Saran Praktis :

1. Untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, disarankan untuk KPP Pratama Majalaya agar lebih baik lagi dalam melakukan sosialisasi kepada Pengusaha Kena Pajak tentang pentingnya pajak bagi pembangunan di Indonesia, contohnya seperti pengenalan pajak yaitu menekankan pentingnya edukasi dan pemahaman mengenai perpajakan sejak dini kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran para Pengusaha Kena Pajak untuk rutin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dan membayar kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui jumlah Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, maka disarankan KPP Pratama Majalaya dapat melakukan penagihan pajak secara optimal, baik melalui penagihan pasif seperti dengan memberikan himbauan kepada wajib pajak agar melakukan pembayaran pajak sebelum jatuh tempo, maupun penagihan aktif melalui surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan. Penagihan pajak yang dilakukan

secara optimal diharapkan dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Saran Akademis :

Dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi pajak diharapkan hasil ini dapat dijadikan acuan agar kedepannya peneliti lain dapat menggunakan variabel yang sama, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda atau mencari variabel lain yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

DAFTAR PUSTAKA

Diaz Priantara. 2013. Fraud Auditing and Investigation. Jakarta: Mitra Wacana Media

Fathmah. 2009. Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Khususnya Ppn Atas Perusahaan Manufaktur. Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan. Jurnal Infestasi Vol. 5, No. 2.

Halim, Abdul., et al. 2014. *Perpajakan.* Jakarta: Saleemba Empat.

Hazra, Muda dkk. 2015. Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. ISSN 2303-1174. Jurnal EMBA. Vol.3 No.4.

Husein Umar. 2011. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua. Jakarta: Rajawali Pers.

Irawan. 2014. "Kebocoran PPN Kian Besar". Kompas. Melalui <http://bisniskeuangan. kompas.com/read/2014/05/12/1517167/Kebocoran.PPN.Kian.Besar>.

Mahendra, Putu Putra dan I Made Sukartha. 2014. Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.9(3).

Mardiasmo. 2013. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset.

Meilia, Rochmawati. 2015. Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Surat Teguran, dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. E-Jurnal Akuntansi. Jom FEKON Vol.2 No.2 Oktober 2015.

Nuramalia Hasanah, Indra Pahala dan Susi Indriani. 2012. Efektifitas Pelaksanaan Self Assessment System Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kualitas Pelayanan Pajak. CBAM-FE UNISSULA Vol.1 No. 1, hal 773-785.

Simanjuntak, Timbul Hamongan dan Iman Mukhlis. 2012. Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2010. Perpajakan Indonesia. Teori dan Teknis Perhitungan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. Perpajakan Indonesia. Konsep dan Aspek Fornal. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sri Mulyani. 2016. Sri Mulyani:Kepatuhan Wajib Pajak Memprihatinkan. Prokal.co. Melalui <http://btv.prokal.co/read/news/1217-sri-mulyani-kepatuhan-wajib-pajak-memprihatinkan.html>

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) . Bandung: Alfabeta.

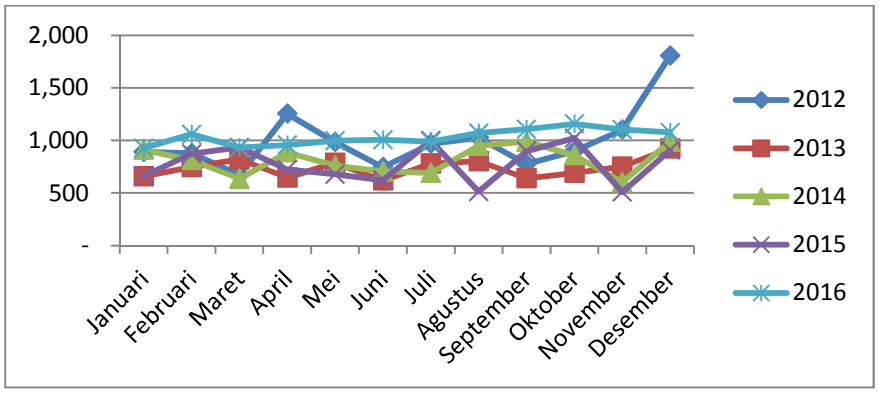
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian dan Pengembangan. Bandung: Alfabeta.

Tarjo dan Indra Kusumawati. 2006. Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System : Suatu Studi Di Bangkalan. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo.

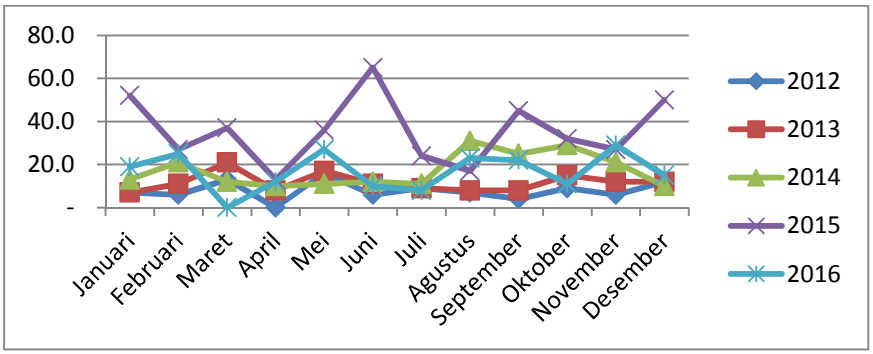
Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadini, dan Linna Ismawati. 2010. Penulisan Karya Ilmiah. Bekasi: Ganesis.

Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat

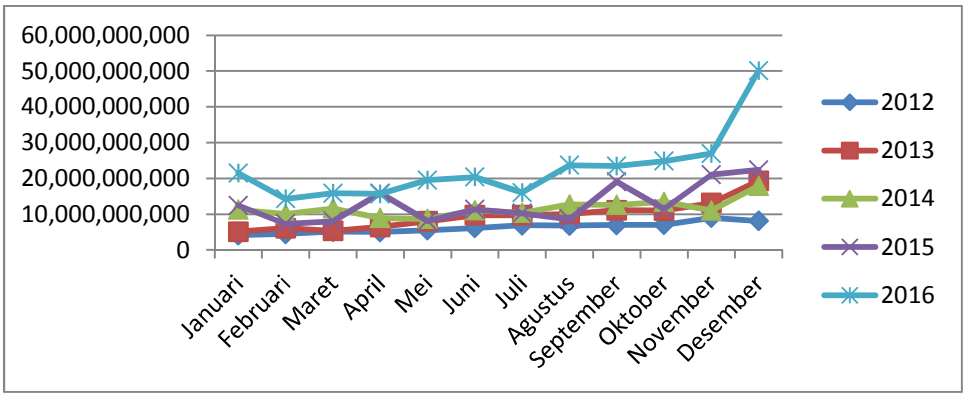
Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.



Gambar 4.1
Grafik Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Periode 2012-2016



Gambar 4.2
Grafik Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Periode 2012-2016

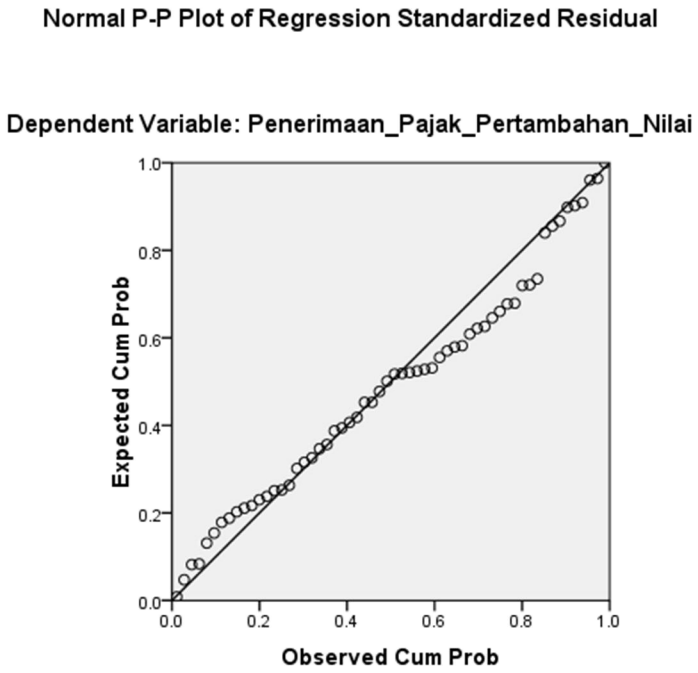


Gambar 4.3
Grafik Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Periode 2012-2016

Tabel 4.4
Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters[a]	Mean	7.8447234E7
	Std. Deviation	5.79605612E9
Most Extreme Differences	Absolute	.113
	Positive	.113
	Negative	-.067
Kolmogorov-Smirnov Z		.876
Asymp. Sig. (2-tailed)		.427

a. Test distribution is Normal.



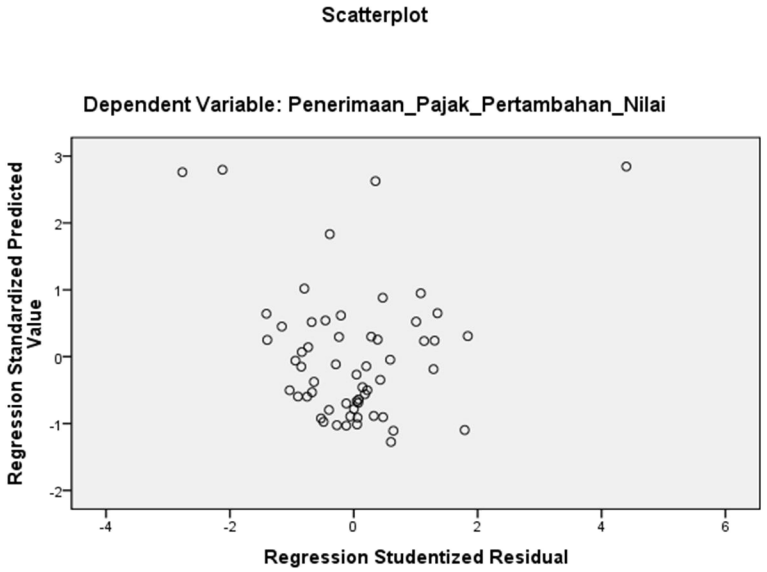
Gambar 4.4
Grafik Normalitas

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Self_Assesment_System	.984	1.017
	Penagihan_Pajak_dengan_Surat_Teguran	.984	1.017

a. Dependent Variable: Penerimaan_Pajak_Pertambahan_Nilai



Gambar 4.5
Grafik Scatterplots

Tabel 4.6
Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.627[a]	.394	.372	5.98568E9	1.959

a. Predictors: (Constant), Penagihan_Pajak_dengan_Surat_Teguran, Self_Assesment_System

b. Dependent Variable: Penerimaan_Pajak_Pertambahan_Nilai

Tabel 4.7
Persamaan Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5.279E9	3.434E9		-1.537	.130
	Self_Assesment_System	1.553E7	3.783E6	.435	4.106	.000
	Penagihan_Pajak_dengan_ Surat_Teguran	2.375E8	6.281E7	.400	3.782	.000

a. Dependent Variable: Penerimaan_Pajak_Pertambahan_Nilai

Tabel 4.8
Hasil Korelasi Pearson *Self Assessment System* dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Correlations

		Self_Assesment_ System	Penerimaan_Pajak_ Pertambahan_Nilai
Self_Assesment_System	Pearson Correlation	1	.469**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	60	60
Penerimaan_Pajak_ Pertambahan_Nilai	Pearson Correlation	.469**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	60	60

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 4.9
Hasil Korelasi Parsial Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Correlations

		Penagihan_Pajak_ dengan_Surat_Teguran	Penerimaan_Pajak_ Pertambahan_Nilai
Penagihan_Pajak_dengan_ Surat_Teguran	Pearson Correlation	1	.456**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	58	58
Penerimaan_Pajak_ Pertambahan_Nilai	Pearson Correlation	.456**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	58	60

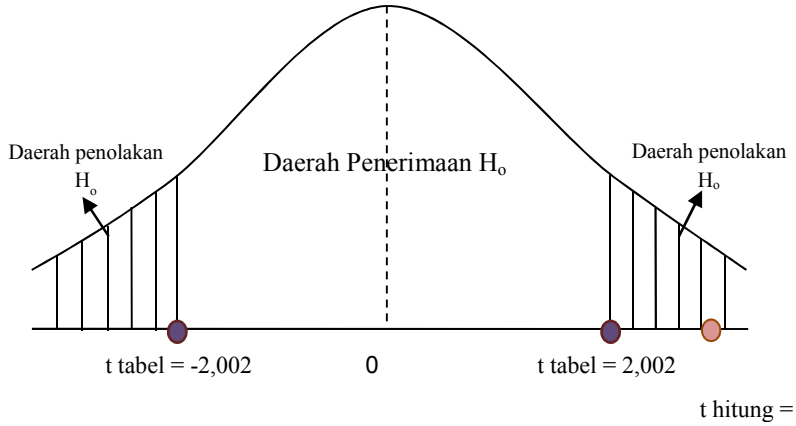
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 4.10
Pengujian Hipotesis Parsial *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5.279E9	3.434E9		-1.537	.130
	Self_Assesment_System	1.553E7	3.783E6	.435	4.106	.000
	Penagihan_Pajak_dengan_ Surat_Teguran	2.375E8	6.281E7	.400	3.782	.000

a. Dependent Variable: Penerimaan_Pajak_Pertambahan_Nilai



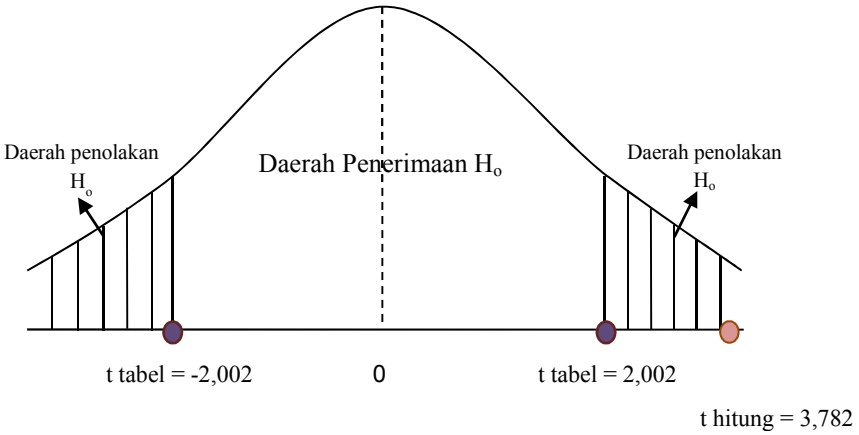
Gambar 4.6
Kurva Hipotesis Parsial *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tabel 4.11
Pengujian Hipotesis Parsial Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5.279E9	3.434E9		-1.537	.130
	Self_Assesment_System	1.553E7	3.783E6	.435	4.106	.000
	Penagihan_Pajak_dengan_ Surat_Teguran	2.375E8	6.281E7	.400	3.782	.000

a. Dependent Variable: Penerimaan_Pajak_Pertambahan_Nilai



Gambar 4.7
Kurva Hipotesis Parsial Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)